

INFLASI DARI SUDUT PANDANG MONETER DAN FISKAL (STUDI KASUS SUMATERA BARAT)

Zul Azhar, Alpon Satrianto, Nofitasari

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

zulazhar@fe.unp.ac.id, alpon.unp@gmail.com,
nofitasari2429@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effect of money supply M2, interest rate, government spending and local tax on the inflation in West Sumatera. This type of research is descriptive research and secondary data in the form of time-series from quarterly 1 2007 to 2017 quarterly 4 using the method of Autoregressive Distributed Lag analysis. The results of this study indicate that money supply in the long run have a significant and positive effect on inflation West Sumatera. In the short run and long run the interest rate has a significant and positive effect on inflation in West Sumatera. Government spending in the Long run has a significant and negative effect on inflation in West Sumatera. Based on the result of this study can be concluded that there is inflation in West Sumatera is monetary phenomenon in the long run.*

Keywords: *Inflation, Money Supply, Interest Rate, Government Spending and Local Tax.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar M2, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan pajak daerah terhadap inflasi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis diskriptif menggunakan data Time Series data kuartalan I tahun 2007 sampai tahun 2017 kuartal IV. Metode analisis yang digunakan Autoregresi Distribusi Lag. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah uang beredar dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat dalam jangka panjang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Sumatera Barat merupakan fenomena moneter lebih dominan pada jangka panjang.*

Kata kunci: *Inflasi, money supply(M2, suku bunga, pengeluaran Pemerintah dan pajak daerah.*

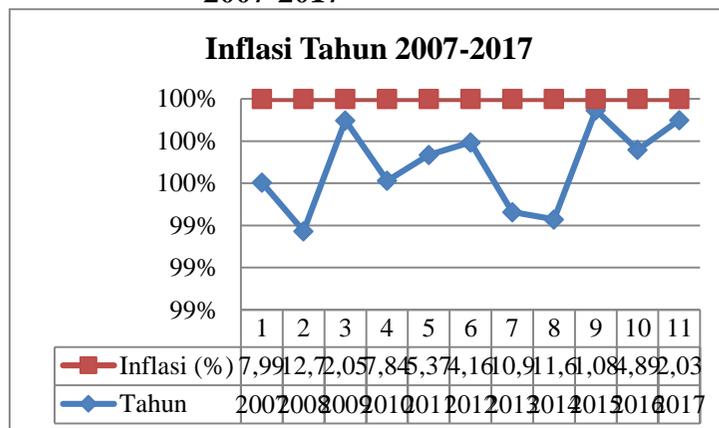
Inflasi suatu peristiwa yang dialami oleh setiap negara bahkan provinsi-provinsi yang ada di negara tersebut, Indonesia yang memiliki 34 provinsi termasuk provinsi Sumatera Barat yang selalu berusaha menciptakan tingkat inflasi terkendali dan stabil. Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

suatu wilayah. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi.

Apabila inflasi itu ringan, maka mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Secara umum penyebab terjadinya inflasi adalah adanya tekanan dari *demand pull inflation* dan *cost inflation*. Dari sisi *demand pull inflation* inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang beredar sedangkan jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Dari sisi *cost inflation*, inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi.

Untuk mengatasi inflasi daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia selaku otoritas moneter melakukan berbagai kebijakan baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Hal ini dapat terlihat pada kinerja dari pemerintah dan Bank Indonesia yang berusaha menjaga kestabilan inflasi di Sumatera Barat. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Grafik 1. Perkembangan Inflasi di Sumatera Barat Tahun 2007-2017



Sumber: Bank Indonesia

Pada grafik 1 memperlihatkan tekanan inflasi tahunan Sumatera Barat meningkat signifikan di akhir tahun 2008 dengan pertumbuhan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,68 persen. Peningkatan ini penyebab utamanya didorong oleh adanya peningkatan harga pada kelompok bahan makanan. Pada triwulan ini kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,62 persen, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan, kurang lancarnya pasokan dari sentra-sentra penghasil yang menyebabkan harga berbagai jenis bumbu-bumbuan seperti cabe dan bawang. Sebaliknya kelompok

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan justru mengalami deflasi yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi mulai awal Desember 2008. (Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar, Triwulan IV 2008)

Pada tabel 1 memperlihatkan tekanan inflasi tahunan Sumatera Barat menurun signifikan di akhir tahun 2015 dengan pertumbuhan inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 penurunan ini signifikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,58 persen. Laju inflasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional dan rata-rata laju inflasi regional Sumatera, bahkan tercatat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah secara nasional. Relatif lebih terjaganya pasokan pangan dibandingkan tahun sebelumnya, kecenderungan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga energi strategis sebagai dampak turunya harga energi strategis dunia, berimbas pada pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun 2015, menjadi faktor-faktor dominan yang menjadikan meredanya Inflasi Sumatera Barat. (Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar, 2015)

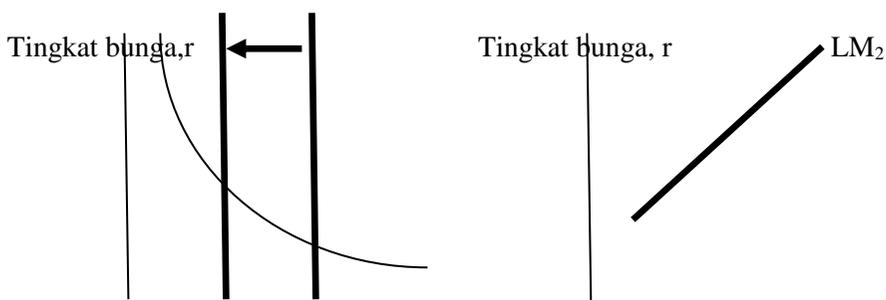
Dalam perkembangannya hingga saat ini pemikiran mengenai stabilitas inflasi, di mana pun itu terjadi dan kapan pun, oleh ekonom inflasi dapat dipercaya sebagai suatu fenomena moneter. Penelitian yang dilakukan Trisdian (2016) menyimpulkan bahwa volatilitas inflasi daerah di Indonesia pada periode 1999 hingga tahun 2009 lebih merupakan fenomena moneter. Bawa (2016) juga melakukan penelitian tentang inflasi di Nigeria dan mereka menyimpulkan hasil dari penelitian mereka bahwa ada dominasi proposisi monetaris pada dinamika inflasi di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh Hervino (2011) juga menyimpulkan hal sama yaitu sisi moneter lebih dominan dalam mempengaruhi volatilitas inflasi di Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 dari pada sisi fiskal. Satrianto (2017) Kebijakan Fiskal lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Moneter terhadap neraca pembayaran Indonesia. Ketika neraca pembayaran turun maka pemerintah mengutamakan kebijakan fiskal dengan menambah pengeluarannya.

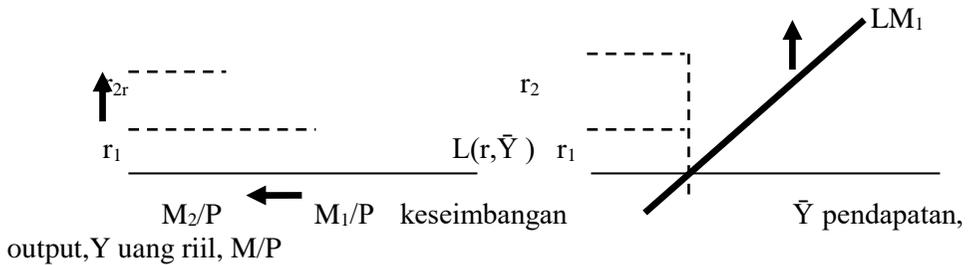
TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Moneter terhadap Inflasi

Selama ini para ekonom percaya bahwa stabilitas inflasi, di mana pun itu terjadi dan kapan pun dipercaya sebagai sebuah fenomena moneter. Kenaikan jumlah uang beredar dan perubahan suku bunga merupakan fenomena moneter. Fenomena moneter dapat terjadi karena adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan bank sentral (otoritas moneter) untuk mengendalikan uang, suku bunga, dan kondisi kredit. Kebijakan moneter dapat yang dilakukan oleh otoritas moneter dapat mempengaruhi output, tenaga kerja, harga dan inflasi (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

a. Pasar Keseimbangan Uang Riil b. Kurva LM





Kurva 1: Penurunan Jumlah Uang Beredar Menggeser Kurva LM ke atas.

Sumber: Mankiw 2006 Hal. 290-291.

Pada gambar 3 memperlihatkan pasar keseimbangan Uang Riil dan Kurva LM , yang menyatakan tingkat bunga menyeimbangkan pasar uang terhadap tingkat pendapatan. Namun, tingkat bunga ekuilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang riil, M/P . Dengan mempertahankan jumlah pendapatan dan kurva permintaan terhadap keseimbangan uang riil bahwa penurunan penawaran keseimbangan uang riil menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas.

Jadi, kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar keseimbangan uang riil. Kurva LM di gambar untuk penawaran keseimbangan uang riil tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang riil, menggeser kurva LM ke atas sehingga suku bunga naik dari r_1 ke r_2 . Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang riil menggeser kurva LM ke bawah.

Teori kuantitas uang

Untuk mengkaji bagaimana kuantitas uang dikaitkan dengan harga. Teori yang dikembangkan disebut dengan teori kuantitas uang (*quantity theory of money*), berasal dari pemikiran salah satu ahli teori moneter pertama yang juga seorang filsuf ekonomi, David Hume (1711-1776). Di dalam teori kuantitas uang hubungan antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas (*quantity equation*):

$$MV = PT \quad (1)$$

M adalah jumlah uang beredar, V adalah kelanjutan peredaran uang, P adalah tingkat harga-harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjual belikan dalam suatu tahun tertentu.

Dimana fungsi permintaan uang (*money demand function*) adalah persamaan yang menunjukkan kuantitas keseimbangan uang riil yang ingin ditahan orang. Fungsi permintaan uang sederhana adalah

$$(M/P)^d = kY \quad (2)$$

Dimana k adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang yang ingin ditahan orang untuk setiap pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang riil yang diinginkan adalah proposional terhadap pendapatan riil.

Fungsi permintaan uang ini menawarkan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas. Untuk melihat hal ini, tambahkan kondisi yang menyebabkan keseimbangan uang riil $(M/P)^d$ harus sama dengan jumlah uang beredarnya M/P ke dalam fungsi permintaan uang.

$$M/P = kY \quad (3)$$

lalu persamaan ini diubah menjadi $M(1/k) = PY$,

$$\text{sehingga ditulis menjadi } MV = PY \quad (4)$$

dimana $v = 1/k$. Menunjukkan kaitan permintaan terhadap uang dan perputaran uang. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap pendapatannya (k adalah besar), uang tidak sering berpindah tangan (V adalah kecil) begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, parameter permintaan k dan perputaran uang V adalah dua sisi yang berlawanan.

Persamaan kuantitas adalah sebuah identitas: definisi dari empat variabel membuat nilainya benar. Persamaan ini berguna karena menunjukkan bahwa jika satu variabel-variabel itu berubah, satu atau lebih variabel lainnya juga harus berubah untuk menjaga kesamaan. Misalnya, jika kuantitas uang meningkat dan perputaran uang tidak berubah, maka baik harga atau jumlah transaksi harus meningkat (Mankiw, 2006:83).

Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi, hal ini didasarkan pada teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2006:85).

Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi

Kebijakan fiskal adalah sebuah program pemerintah yang berhubungan dengan pembelian barang dan jasa dan pengeluaran pembayaran transfer dan jumlah dan jenis pajak. Fenomena fiskal dapat terjadi disebabkan oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal ekspansif yaitu dengan menaikkan pengeluaran pemerintah, maka kenaikan pengeluaran pemerintah yang terjadi tersebut merupakan fenomena fiskal. Fenomena fiskal yang terjadi ini dapat mempengaruhi inflasi.

Pengeluaran pemerintah adalah sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:

$$Y = C + I + G + X - M \quad (5)$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G menyatakan pengeluaran pemerintah (*government expenditures*), I menyatakan investasi, $X - M$ adalah ekspor bersih.

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinnya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. (Mankiw, 2006:114)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di golongan kepada penelitian deskriptif dan asosiatif dengan menggunakan variabel jumlah uang beredar, suku bunga (variabel moneter) dan pengeluaran pemerintah, pajak daerah (variabel fiskal) yang merupakan variabel independen dan inflasi sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* yaitu data yang berasal dari lembaga resmi Kantor Bank Indonesia perwakilan Sumbar (BI) yang dapat dilihat dari *website* internet pada lembaga yang bersangkutan dengan runtutan waktu dan menggunakan data kuartal tahun 2007:Q1 sampai dengan 2017:Q4. Metode analisis yang digunakan yaitu metode Autoregresi Distribusi Lag untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh anatar variabel tersebut maka didapatkan model sebagai berikut:

$$Y_t = Y\alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_1 Y_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_2 X_{1t-i} + \sum_{i=1}^p \alpha_3 X_{2t-i} + \sum_{i=1}^p \alpha_4 X_{3t-i} + \sum_{i=1}^p \alpha_5 X_{4t-i} + \mu_t \quad (6)$$

Y_t adalah Inflasi, X_{1t} adalah Jumlah Uang Beredar, X_{2t} adalah Suku Bunga X_{3t} adalah Pengeluaran Pemerintah, X_{4t} adalah Pajak, α_0 adalah Konstan μ_t adalah *error term*.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara keseluruhan dimana inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Jumlah uang beredar (M2 yang meliputi uang kuasi yang dipegang masyarakat dan surat berharga selain saham. Suku bunga SBI adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto atau bunga. Sedangkan data pengeluaran pemerintah diproksi dengan menggunakan data pengeluaran konsumsi pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh pribadi maupun suatu badan kepada daerah yang digunakan dengan tujuan untuk pembayaran daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak yang digunakan ialah pajak daerah Sumatera Barat.

Model analisis Autoregresi distribusi lag digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan α 5% maka dapat dilihat pengaruhnya apakah signifikan atau tidak. Sebelum melakukan uji Autoregresi Distribusi Lag (ARDL) setiap variabel yang diteliti dilakukan uji stasioneritas, Pengujian *unit root* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Philips-Perron (PP) Test. Adapun kelebihan dari pengukuran Philips-Perron test ini dibandingkan dengan Augmented Dicky Fuller (ADF) Test adalah PP test memasukan unsur perubahan struktural yang kritis Mac-kimon maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa

data tidak stasioner ditolak, terhadap hipotesis alternatifnya yang berarti data stasioner. Selanjutnya dilakukan uji Kointegrasi *Bound Testing*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya kointegrasi antara variabel yang diteliti. Mahyus (2016).

Definisi Operasional

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan

| Variabel | Definisi |
|-------------------------------|--|
| Inflasi | Inflasi yang dihitung dari pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator dari inflasi dengan rumus sebagai berikut: $\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ |
| Jumlah Uang Beredar | uang beredar diambil dari data M2, yang menggunakan data M2 yang meliputi uang kuasi yang dipegang masyarakat dan surat berharga selain saham. |
| Suku Bunga | Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga BI rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. |
| Pengeluaran pemerintah | Data pengeluaran pemerintah diprosi dengan menggunakan data pengeluaran konsumsi pemerintah, Pengeluaran konsumsi pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan (Bank Indonesia, 2016). |
| Pajak | Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang diteliti yaitu 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas, dimana variabel tersebut adalah jumlah uang beredar, suku bunga merupakan variabel moneter dan pengeluaran pemerintah, pajak daerah merupakan variabel fiskal serta inflasi sebagai variabel terikat dengan indikator IHK atau laju inflasi dengan satuan persen. Tabel 2 adalah hasil dari analisis ARDL jangka pendek.

Pada tabel 2 menunjukkan Hasil memperlihatkan bahwa variabel lag dari variabel dependen yaitu INFLASI(-1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Inflasi inflasi itu sendiri, melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,0260 < \alpha = 0,05$. Selanjutnya dari Tabel 2 terlihat bahwa Jumlah uang beredar (X_1) terhadap inflasi di Sumatera Barat adalah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Artinya terjadinya perubahan terhadap jumlah uang beredar tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek.

Variabel suku bunga (X_2) terhadap inflasi di Sumatera Barat adalah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat tanpa lag dimana melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0.0014 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 2,973309 Artinya kenaikan kenaikan suku bunga sebesar 1 persen akan menurunkan inflasi sebesar 2,973309

persen begitupun sebaliknya. Nilai koefisien yang positif artinya apabila suku bunga meningkat maka inflasi juga meningkat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Tabel 2 Hasil Estimasi Jangka Pendek

| Variable | Coefficient | Prob. |
|----------------|-------------|--------|
| D(Inflasi(-1)) | 0,4199 | 0,0260 |
| D(Jub) | -0,0010 | 0,0596 |
| D(Suku Bunga) | 2,9733 | 0,0014 |
| D(Pengeluaran) | -0,0011 | 0,0915 |
| D(Pajak) | -0,0853 | 0,0775 |
| CointEq(-1) | -1,6662 | 0,0000 |

Sumber: Hasil olahan *Eviews* 9, 2019

Variabel pengeluaran pemerintah (X_3), dari tabel 2 terlihat bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Artinya terjadinya perubahan terhadap variabel pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek.

Variabel lainnya pajak daerah (X_4), dari tabel 2 terlihat bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Artinya terjadinya perubahan terhadap variabel pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek.

Koefisien error correction (-1,666185) dan secara statistik signifikan. Hal ini berarti bahwa 5% disequilibrium yang terjadi antara Inflasi dengan jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan pajak akan dikoreksi kembali dalam masa satu periode (satu kuartal). Tanda koefisien negatif menunjukkan bahwa terdapat mekanisme koreksi terhadap penyimpangan keseimbangan jangka panjangnya.

Selanjutnya Estimasi Autoregresi Distribusi Lag (ARDL) model jangka panjang terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang jumlah uang beredar (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,0187 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,0009 Artinya kenaikan jumlah uang beredar sebesar 1 persen akan menaikkan inflasi sebesar 0.0009 persen begitupun sebaliknya. Nilai koefisien yang positif artinya apabila jumlah uang beredar meningkat maka inflasi juga meningkat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Tabel 3 Hasil Estimasi Jangka Panjang

| Variable | Coefficient | Prob. |
|-------------|-------------|--------|
| Jub | 0,0009 | 0,0187 |
| Suku Bunga | 2,5553 | 0,0002 |
| Pengeluaran | -0,0039 | 0,0004 |
| Pajak | -0,0500 | 0,2627 |
| C | -16,5478 | 0,0024 |

Sumber: Hasil olahan *Eviews* 9, 2019

Pada tabel 3 memperlihatkan suku bunga (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,0002 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 2,555309 Artinya kenaikan jumlah uang beredar sebesar 1 persen akan menaikkan inflasi sebesar 2,555309 persen begitupun sebaliknya. Nilai koefisien yang positif artinya apabila suku bunga meningkat maka inflasi juga meningkat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengeluaran pemerintah (X_3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel inflasi di Sumatera Barat. Melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,0004 < \alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar -0,0039 Artinya kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar akan menurunkan inflasi sebesar -0,0039 persen. Nilai koefisien yang negatif artinya apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menurunkan inflasi asumsi *ceteris paribus*.

Selanjutnya pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel inflasi. Artinya kenaikan pajak sebesar 1 Milyar akan menurunkan inflasi sebesar -0,0500 persen tetapi tidak signifikan pada jangka panjang.

Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Sumatera Barat.

Dalam jangka pendek JUB memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap variabel inflasi di Sumatera Barat. Dalam jangka panjang jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas jumlah uang beredar yang kecil dari 0,05. Signifikannya jumlah uang beredar yang mengindikasikan bahwa naik turunnya tingkat inflasi ditentukan oleh jumlah uang beredar. Dapat mengartikan bahwa dalam jangka panjang kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi begitupun sebaliknya penurunan jumlah uang beredar akan menurunkan inflasi di Sumatera Barat.

Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi, hal ini didasarkan pada teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2006:85).

Kebijakan terhadap pengendalian jumlah uang beredar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter ekspansif (*monetary expansive*) atau bisa disebut dengan kebijakan moneter longgar atau *easy money policy* yaitu suatu tindakan atau kebijakan yang digunakan dalam rangka meningkatkan jumlah uang beredar. pengendalian jumlah uang beredar sangat di perlukan dalam mengendalikan perekonomian agar tetap stabil, jika jumlah uang beredar meningkat terlalu tinggi ini nantinya akan meningkatnya permintaan agregat yang mendorong tingkat konsumsi menjadi tinggi, jika tingkat konsumsi tinggi namun penawaran terhadap permintaan agregat rendah ini nantinya akan memicu adanya inflasi.

Hasil penelitian ini relevan, maka terdapatnya kesesuaian antara hasil yang diteliti dengan penelitian yang dilakukan Kemal (2006) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah uang beredar secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat inflasi dalam jangka panjang di Pakistan.

Menurut Mehrara (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa uang beredar menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan inflasi di Iran.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Trisdian (2015) Penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi daerah di Indonesia pada periode tahun 1999 hingga tahun 2009 merupakan fenomena moneter, bukan fenomena fiskal. Hal ini terlihat pada variabel jumlah uang beredar (dari sisi moneter) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi daerah di Indonesia.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Sumatera Barat

Dalam jangka pendek dan jangka panjang suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas suku bunga yang kecil dari 0,05. Signifikannya pengaruh suku bunga terhadap inflasi mengindikasikan bahwa naik turunnya tingkat inflasi di tentukan oleh tingkat suku bunga.

Teori keynes mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan menurunkan inflasi dikarenakan masyarakat langsung menyimpan uang mereka di bank-bank umum dan berharap mendapatkan bunga dari simpanan mereka tersebut sehingga jumlah uang beredar berkurang dan inflasi pun ikut turun. Signifikannya pengaruh suku bunga terhadap inflasi mengindikasikan bahwa naik turunnya tingkat inflasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Hal ini dikarenakan peningkatan suku bunga akan mengakibatkan *cost of fund* dari perusahaan meningkat. Peningkatan ini akan mengakibatkan biaya produksi dari perusahaan mengalami peningkatan yang mengakibatkan harga barang meningkat dan terjadilah peningkatan inflasi. Inflasi ini dapat dari penyebab inflasi dari *cost push inflation* dengan asumsi *ceteris paribus*. Sebaliknya, penurunan suku bunga akan mengakibatkan *cost fund* dari perusahaan juga turun. Penurunan ini akan menurunkan biaya produksi dari perusahaan yang berakibat pada penurunan inflasi yang juga dilihat dari sisi *cost push inflation*.

Hasil penelitian ini terdapatnya kesesuaian antara hasil yang diteliti dengan penelitian yang dilakukan Asuquo (2012) bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Nigeria. Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapatnya kesesuaian antara hasil yang diteliti dengan penelitian yang dilakukan Agusmianata 2017 yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa suku bunga secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat inflasi dalam jangka panjang di Indonesia. Pengaruh positif suku bunga dan inflasi mengisyaratkan kebijakan moneter cenderung mengikuti pergerakan inflasi. Dengan kata lain, kebijakan tersebut bersifat reaktif, kemudian diturunkan apabila tingkat inflasi sudah menunjukkan trend penurunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2011) bahwa suku bunga memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat inflasi di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini terjadi jika pihak bank tidak lagi

memperluas penawaran uang, maka suku bunga pasar terpaksa naik ke tingkat yang sama dengan tingkat alamiah, hal ini mencegah permintaan investasi tambahan (mungkin mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi) dengan demikian menghentikan inflasi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap inflasi di Sumatera Barat

Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Sedangkan dalam jangka panjang Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel inflasi. Kondisi ini terlihat dari nilai probabilitas pengeluaran pemerintah yang kecil dari 0,05. Artinya kenaikan pengeluaran pemerintah menurunkan inflasi di Sumatera Barat dalam jangka panjang.

Adanya pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dalam jangka panjang, hal ini disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan mempersempit pengeluaran pemerintah dengan menunda proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi transfer pemerintah, yang dimaksud transfer pemerintah adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung misalnya bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mehrara (2015) hasil penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap inflasi selama lima puluh tahun di Iran. Hal ini disebabkan oleh peningkatan subsidi oleh pemerintah untuk barang dan jasa, yang mana mengurangi perubahan biaya produksi dan penawaran agregat. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2011) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Agusmianata (2017) bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan mempersempit pengeluaran pemerintah, dengan menunda proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi transfer pemerintah, yang dimaksud transfer pemerintah adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung.

Adanya pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dalam jangka panjang, hal ini disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan mempersempit pengeluaran pemerintah dengan menunda proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi transfer pemerintah, yang dimaksud transfer pemerintah adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung misalnya bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi.

Dengan mengurangi transfer pemerintah maka laju pertumbuhan uang yang beredar di masyarakat dapat dikendalikan sehingga inflasi dapat dikurangi, hal ini sesuai dengan teori Keynes yang mengatakan ada tiga bentuk kebijakan

pemerintah dapat digunakan untuk mencapaitujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung.

Kebijakan fiskal dijalankan oleh Departemen keuangan dan alat yang digunakan adalah melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (perpajakan). Saat inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentukurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Secara lebih khusus, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluarannya disebut kebijakan fiskal ekspansioner untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. Sebaliknya, Keynes mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya menaikkan pajak atau mengurangi pengeluarannya yang disebut Kebijakan fiskal kontraksioner untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Berkurangnya pengeluaran pemerintah menyebabkan jumlah uang yang akan beredar di masyarakat berkurang dan dengan menaikkan pajak berarti penghasilan seseorang akan berkurang karena sebagian dari penghasilannya itu dalam bentuk pajak telah di berikan kepada pemerintah. Artinya pendapatan disponsibel berkurang yang pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat juga akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan harga-harga barang tidak naik lagi sehingga *demand pull inflation* dapat dikendalikan dan inflasi akan turun.

Pengaruh Pajak terhadap inflasi di Sumatera Barat

Dalam jangka pendek dan jangka panjang pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Artinya terjadinya perubahan terhadap variabel pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek. Artinya kenaikan pajak akan menurunkan inflasi tetapi tidak signifikan pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, didukung oleh penelitian yang dilakukan Surjaningsih (2012) hasil penelitiannya bahwa peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi pada jangka pendek di Indonesia. Sementara pajak dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Sumatera Barat artinya perubahan pajak akan menurunkan inflasi tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Temuan bahwa shock kenaikan pajak akan berdampak terhadap kenaikan inflasi ini kurang sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat. Kenaikan pajak pertambahan nilai misalnya akan mempengaruhi keputusan konsumsi pelaku ekonomi, sehingga akan berdampak terhadap menurunnya tekanan inflasi (Wren Lewis (2002) dalam surjaningsih (2012). Salah satu argumen bagi temuan tersebut adalah peningkatan pajak dipandang sebagai kenaikan biaya produksi oleh produsen, sehingga menyebabkan kenaikan harga jual barang ke konsumen. Argumen lainnya adalah bahwa inflasi lebih disebabkan oleh faktor di luar kebijakan fiskal, seperti *imported inflation*, output gap, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural pemerintah sehingga kenaikan pajak tidak berpengaruh terhadap inflasi.

SIMPULAN

Dari pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah uang beredar berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang pada model estimasi ARDL didapatkan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera Barat, dimana dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan serta jangka panjang jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang pada model estimasi ARDL didapatkan bahwa suku bunga memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera Barat, dimana dalam jangka pendek positif dan signifikan serta di jangka panjang positif dan signifikan. Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang pada model estimasi ARDL didapatkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera Barat, dimana dalam jangka pendek negatif dan tidak signifikan serta di jangka panjang negatif dan signifikan.

Dapat dinyatakan bahwa inflasi di Sumatera Barat berkointegrasi dengan jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan pajak yang berarti terdapatnya pengaruh jangka panjang. Inflasi yang terjadi di Sumatera Barat Dapat dinyatakan sebagai fenomena Moneter yang terjadi pada jangka panjang karena variabel moneter seperti uang beredar dan suku bunga terdapat hubungan positif signifikan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran bagi pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia diharapkan mempunyai kebijakan moneter yang tepat dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Karena jumlah uang beredar berkaitan dengan kestabilan perekonomian di Sumatera Barat dan merupakan instrument penting dalam mengelola inflasi dan tingkat suku bunga.

Pemerintah diharapkan mempunyai kebijakan fiskal yang tepat dalam mengendalikan pengeluaran pemerintah dan pajak. Karena pengeluaran pemerintah berkaitan dengan perekonomian di Sumatera Barat dan merupakan instrument penting dalam mengelola inflasi.

Bank Indonesia dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, seharusnya melakukan komunikasi yang baik terkait dengan perumusan kebijakan masing-masing, namun tidak mengurangi independensi dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam mengendalikan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat. Salah satu contoh nyatanya yang bisa dilakukan adalah memberikan peran yang lebih besar terhadap penguat Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) pada masing-masing daerah untuk mendukung pengendalian Inflasi daerah yang terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

Aloysius, Deno Hervino. "Volatilitas Inflasi Di Indonesia: Fiskal Atau Moneter?", *Finance and Banking Journal*, Vol. 13 No. 2. 2011, hal. 139-149.

- Agusmianata, Nuri dkk. 2017. "Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia", *jurnal ekonomi bisnis dan manajemen*, vol 19 No. 2, Hal. 1-13.
- Asoquo. 2012. *Inflation Accounting and Control Through Monetary Policy Measures in Nigeria*. IOSR Journal of Bussness management, hal 53-62.
- Bank Indonesia, 2017. Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar 2017. Padang.
-, 2016. Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar 2016. Padang
-, 2015. Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar 2015. Padang.
-, 2008. Laporan Kajian Ekonomi Keuangan Regional Sumbar 2008. Padang.
- Bank Indonesia, 2017. Laporan Kebijakan Moneter 2017. Jakarta.
-, 2014. Laporan Kebijakan Moneter 2014. Jakarta.
-, 2012. Laporan Kebijakan Moneter 2012. Jakarta.
-, 2010. Laporan Kebijakan Moneter 2010. Jakarta.
-, 2007 Laporan Kebijakan Moneter 2008. Jakarta
- Bawa, Sani dkk. 2016. *Threshold Effect of Inflation On Economic Growth in Nigeria*. *CBN journal of applied statistic*. Vol 3 Iss 1, Hal. 43-63.
- Case, Karl. E dan Ray. C. Fair 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Indonesia: PT. Indeks, kelompok Gramedia.
- Kemal, Ali. 2006. *Is Inflation in Pakistan a Monetary of Phenomenon*. *Journal The Pakistan Development Review* 45:2 summer Hal. 213-220..
- Mankiw, N Gregory. *Makroekonomi Edisi ke Enam*. Jakarta: Erlangga
- Mahyus. 2016. *Analisi Ekonometrika Time Series edisi ke dua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mehrara, Mohsen dan Ahmad Sojoudi. 2015. *The Relationship Between Money, Government Spending and Inflation in the Iranian Economy*. *International Letter of social and humanistic sciences* Vol. 51, Hal 89-94
- Rahmawati. 2011. Pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan suku bunga terhadap infasi di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal aplikasi manajemen*, vol 9 nomor 1 hal 177-188.
- Rosyetti dan Eriyati. 2011. "Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 1981-2010". Hal. 1-9.
- Satrianto, Alpon. 2017. Kebijakan Fiskal, Moneter dan Neraca Pembayaran di Indonesia: Suatu kajian efektifitas. *Jurnal Economac*. Vol. 1 No. 2 Hal:54-64.
- Surjaningsih, Ndari dkk. 2012. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. hal. 389-420.
- Trisdian, Paula Adiati. 2015. "Volatilitas Inflasi Daerah di Indonesia: Fenomena Moneter Atau Fiskal ?". *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXIV No. 1. hal. 76-89.
- Uang beredar, <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1074> di akses 29 November 2018.